

***Feedback* Kebijakan Komunikasi Publik Pemasangan *Speed bump* Pada ZoSS Pada warga Kabupaten Bengkulu Tengah: Solusi Keselamatan atau Sumber Gangguan?**

Received: 07-02-2025

Revised: 01-05-2025

Accepted: 31-05-2025

Bertarius Himawansyah*
Universitas Bengkulu
E-mail: zetata@gmail.com

Dhanurseto Hadiprashada
Universitas Bengkulu
E-mail: hadiprashada@unib.ac.id

Achmad Aminudin
Universitas Bengkulu
E-mail:
Achmadamin99@yahoo.com

Abstract: This research aims to find out what *feedback* is obtained from a public policy regarding the installation of speedbumps in school safety zones. The high number of accidents that occurred among students ultimately prompted the government to implement a School Safe Zone (Zoss) with the installation of speedbumps. Unfortunately, people complained about the impact of speedbumps, noise and shaking which resulted in damage to their homes. This research was conducted in Central Bengkulu Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data collection was carried out by interviewing informants and also observing. The results obtained were that there was damage experienced by residents due to the continued occurrence of driving violations in the school safety zone in Central Bengkulu Regency. *Feedback* from this policy is classified as negative because the complaint letters sent by residents have not received a response from the Ministry of Transportation. Even though speedbumps address many traffic accidents, design and feasibility need to be considered before being implemented in school safety zones. This research recommends that there be effective hearings and communication between the government and affected residents so that trust is maintained on both parties.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui umpan balik apa saja yang diperoleh dari suatu kebijakan publik mengenai pemasangan speedbump di zona aman sekolah. Tingginya angka kecelakaan yang terjadi di kalangan siswa pada akhirnya mendorong pemerintah untuk menerapkan Zona Aman Sekolah (Zoss) dengan pemasangan speedbump. Sayangnya, masyarakat mengeluhkan dampak dari speedbump, kebisingan, dan guncangan yang mengakibatkan kerusakan pada rumah mereka. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara kepada informan dan juga observasi. Hasil yang diperoleh adalah adanya kerusakan yang dialami oleh warga akibat terus terjadinya pelanggaran berkendara di zona aman sekolah di Kabupaten Bengkulu Tengah. Umpan balik dari kebijakan ini tergolong negatif karena surat pengaduan yang dikirimkan warga belum mendapat tanggapan dari Kementerian Perhubungan. Meskipun speedbump mengatasi banyak kecelakaan lalu lintas, desain dan kelayakannya perlu dipertimbangkan sebelum diterapkan di zona aman sekolah. Penelitian ini merekomendasikan

*) *Corresponding Author*

Keywords: *Feedback*, Public Policy, Speedbump, Zoss, Public Communication

agar ada dengar pendapat dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga yang terdampak agar kepercayaan tetap terjaga pada kedua belah pihak.

PENDAHULUAN

Kenyamanan dan keselamatan berlalu lintas merupakan konsentrasi pemerintah dari tahun ke tahun. Tingginya angka kecelakaan lalu lintas, terutama yang melibatkan pelajar dan pejalan kaki, mengharuskan pemerintah untuk mengambil langkah strategis guna mengurangi angka kecelakaan tersebut. Kebijakan yang dapat ditempuh untuk mengantisipasi hal tersebut adalah dengan menerapkan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), yang bertujuan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak yang sedang dalam perjalanan menuju sekolah. Penerapannya akan dipasang infrastruktur yang mendukung seperti *speed bump* di sepanjang jalan depan sekolah. Dengan adanya *Speed bump* diharapkan kendaraan dapat mengurangi kecepatan sehingga anak-anak aman untuk menyeberang (Baihaqi et al., 2024).

Berdasarkan laporan Kementerian Perhubungan pada tahun 2023 disebutkan bahwa pemerintah diharapkan tidak hanya berfokus pada pengaturan kecepatan kendaraan, tetapi juga memperhatikan faktor lain seperti desain jalan, fasilitas pejalan kaki, dan pendidikan keselamatan lalu lintas kepada masyarakat. Data dari Kementerian Perhubungan tersebut juga menunjukkan bahwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar merupakan kontribusi utama dalam meningkatnya angka total kecelakaan. Pengendara tidak mengindahkan batas kecepatan yang seharusnya terutama di sekitar lingkungan sekolah. Mengingat kompleksitas masalah keselamatan lalu lintas, kebijakan yang hanya mengandalkan satu solusi seperti pemasangan *speed bump* mungkin tidak cukup efektif dalam jangka panjang.

Studi yang dilakukan oleh Setyaningsih & Supriyadi (2023) di Surabaya menunjukkan bahwa penerapan *speed bump* di kawasan sekolah dapat mengurangi kecepatan kendaraan hingga 25%. Hal ini berdampak terhadap pengurangan kecelakaan. Kemudian data yang dihimpun oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta (2022) menyebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas di zona yang telah menerapkan ZoSS turun sebanyak 18% dalam satu tahun pertama setelah diterapkan. Artinya, bahwa keberadaan ZoSS yang dilengkapi dengan pengaturan kecepatan dan infrastruktur keselamatan lainnya dapat memberikan dampak positif dalam mengurangi angka kecelakaan di area rawan kecelakaan lalu lintas.

Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan dan Prasetyo (2023) menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan semacam ini sangat bergantung pada penyesuaian desain dan pengelolaan fasilitas keselamatan. Dalam kasus pemasangan *speed bump*, salah satu faktor penting desain *speed bump* itu sendiri seperti ukuran tinggi dan lebar. Jika terlalu tinggi atau terlalu tajam, bisa menambah risiko kecelakaan sepeda motor atau bahkan merusak kendaraan. Maka dari itu diperlukan standar yang jelas dalam pemasangan fasilitas ini agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi pengendara.

Menurut penelitian oleh Sutrisno dan Rahmawati (2023) pemasangan *speed bump* terbukti dapat mengurangi angka kecelakaan di beberapa wilayah, namun dampak negatif terhadap kenyamanan berkendara juga cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut memiliki niat baik untuk keselamatan, namun perlu ada evaluasi lebih lanjut mengenai seberapa

besar dampak negatif yang ditimbulkan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar area tersebut. Pemasangan *speed bump*, jika tidak dilakukan dengan perencanaan yang matang, bisa menimbulkan lebih banyak masalah bagi warga.

Meskipun tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan keselamatan, terdapat sejumlah kritik dari masyarakat terkait dengan dampak pemasangan *speed bump* tersebut. Sebagian besar kritik ini datang dari pengendara yang merasa terganggu dengan adanya tonjolan pada jalan yang mengharuskan mereka melambat secara tiba-tiba. Hal ini menyebabkan ketidaknyamanan, terutama bagi pengendara sepeda motor dan kendaraan dengan suspensi rendah. Selain itu, kebisingan yang ditimbulkan oleh kendaraan yang melewati *speed bump* juga menjadi masalah bagi warga yang tinggal di sekitar lokasi pemasangan (Aristyavani, 2017).

Kebijakan tentu akan menimbulkan pro dan kontra serta dampak yang muncul. Ada beberapa komplain terkait pemasangan *speed bump* di kawasan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang sering muncul di berbagai daerah, termasuk di Bengkulu dan kota-kota besar lainnya. Diantaranya adalah kendaraan terhambat dan mengganggu arus lalu lintas, kerusakan kendaraan, keluhan dari warga yang tinggal di sekitar serta kualitas dan penataan yang tidak konsisten.

Speed bump di kawasan Zona Selamat Sekolah di Bengkulu Tengah juga memicu perdebatan di media sosial dan kalangan pengendara. Permasalahan muncul karena pemasangan speedbump di Zona Selamat sekolah SD Negeri 01. Warga mengeluhkan adanya ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat speed bump. Warga mengajukan surat kepada Balai Transportasi Darat melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkulu tengah seperti gambar berikut.



Gambar 1. Surat pernyataan dari warga
Sumber : Data Penelitian, 2024

Dinas Perhubungan Bengkulu Tengah (2024) menyebutkan bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas di kawasan sekitar ZoSS menurun tetapi terdapat keluhan dari warga mengenai gangguan kenyamanan berkendara meningkat. Hal ini menunjukkan adanya trade-off antara keselamatan dan kenyamanan, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam perencanaan kebijakan transportasi. Meskipun ada komplain-komplain tersebut, kebijakan pemasangan *speed bump* di kawasan ZoSS tetap dianggap penting sebagai langkah untuk melindungi keselamatan pelajar dan masyarakat sekitar. Oleh karena itu, perbaikan dan evaluasi berkala terhadap desain dan penempatan *speed bump* sangat diperlukan untuk mengoptimalkan efektivitasnya sambil meminimalkan dampak negatif bagi pengemudi dan warga sekitar.

Jika hal ini terjadi, warga berhak mengajukan keluhan kepada pemerintah setempat atau pihak terkait untuk mencari solusi yang tepat. Pemerintah dan instansi terkait perlu melakukan evaluasi atas desain dan penempatan *speed bump* yang ada untuk memastikan bahwa kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) dapat mengurangi risiko kecelakaan tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Pendekatan yang lebih inklusif, seperti melibatkan warga dalam perencanaan kebijakan, dapat membantu menciptakan solusi yang lebih seimbang dan menguntungkan semua pihak. Ini juga merupakan umpan balik atau *feedback* dari rakyat terhadap kebijakan pemerintah (Yamin et al., 2024)

Penting untuk dicatat bahwa kebijakan pemasangan *speed bump* pada ZoSS ini seharusnya tidak hanya dinilai dari aspek keselamatan, tetapi juga harus memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kualitas hidup warga sekitar. Efektivitas kebijakan transportasi sangat bergantung pada seberapa jauh kebijakan tersebut diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan ini dengan melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan. Harus ada komunikasi berlanjut antara pemerintah dan warga untuk menemukan *win-win solution*. Beberapa masalah teknis dan sosial yang ditemukan selama implementasi kebijakan ini juga menyoroti perlunya pendekatan partisipatif dalam merancang kebijakan transportasi yang dapat diakses dan diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, media sosial dapat memainkan peran penting dalam mengumpulkan umpan balik dari masyarakat, serta menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.

Dengan latar belakang tersebut, maka penelitian ini diharapkan mampu menganalisis *feedback* kebijakan pemasangan *speed bump* pada ZoSS di Bengkulu Tengah, khususnya terkait dengan keselamatan lalu lintas dan kenyamanan warga. Kebijakan transportasi sangat perlu untuk daerah ini karena aktivitas kendaraan yang padat. Bengkulu tengah memiliki jalur lalu lintas penghubung antar kabupaten dan provinsi. Selain itu juga perlu melihat bagaimana evaluasi terhadap kebijakan yang telah diterapkan. Berdasarkan penelitian terdahulu dengan topik serupa terdapat distingsi dengan studi yang peneliti lakukan.

Sebagian besar penelitian sebelumnya mungkin hanya fokus pada dampak keselamatan tanpa mengkaji secara mendalam dampak sosial dan ketidaknyamanan yang ditimbulkan, seperti kebisingan, guncangan kendaraan, atau kerusakan kendaraan. Selain itu, kebijakan seperti pemasangan *speed bump* sering kali diterapkan tanpa mempertimbangkan variabel lokal yang dapat memengaruhi efektivitasnya, seperti kondisi jalan, volume kendaraan, dan karakteristik demografi setempat. Dengan fokus pada Bengkulu Tengah sebagai studi kasus, penelitian ini dapat

memberikan wawasan baru bagi pemerintah daerah lain yang menghadapi tantangan serupa. Evaluasi yang mendalam ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi perbaikan kebijakan transportasi dan keselamatan di masa depan, serta mengarah pada kebijakan yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

Kebijakan publik merupakan keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Kebijakan ini mencakup serangkaian tindakan yang diambil oleh lembaga pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu, yang biasanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Proses pembentukan kebijakan publik melibatkan analisis masalah, perumusan tujuan, pengembangan alternatif kebijakan, dan akhirnya implementasi serta evaluasi kebijakan tersebut. Dalam hal ini, kebijakan publik bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah sosial, ekonomi, politik, atau lingkungan yang dihadapi oleh suatu negara atau wilayah.

Menurut Dye (2022), kebijakan publik terbentuk melalui interaksi antara berbagai faktor, seperti kepentingan politik, keputusan legislator, serta pengaruh dari kelompok-kelompok masyarakat atau aktor-aktor tertentu. Proses pembuatan kebijakan ini dapat berlangsung dengan cara yang formal atau informal, dan sering kali melibatkan kompromi antara berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Pembuatan kebijakan publik juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi yang ada pada saat itu, serta oleh kebijakan sebelumnya yang mungkin mempengaruhi kebijakan baru. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tetapi juga sebagai refleksi dari kondisi sosial-politik yang ada.

Pada tingkat implementasi, kebijakan publik dapat berfungsi untuk mencapai perubahan dalam masyarakat, baik dalam bentuk peraturan yang lebih ketat, pemberian insentif, ataupun program-program yang didukung oleh dana publik. Namun, implementasi kebijakan seringkali menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kekurangan sumber daya hingga ketidaksepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, evaluasi kebijakan menjadi aspek penting dalam proses kebijakan publik, untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dan bahwa kebijakan tersebut memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (Handayani et al., 2021).

Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah kawasan yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan pelajar dan masyarakat sekitar sekolah dari risiko kecelakaan lalu lintas. ZoSS biasanya diterapkan di area dengan tingkat lalu lintas yang padat, khususnya di sekitar sekolah, tempat pelajar sering menyeberang jalan. Pemasangan infrastruktur seperti *speed bump*, penanda jalan, dan lampu lalu lintas diharapkan dapat mengurangi kecelakaan yang melibatkan pelajar yang sedang berjalan atau menyeberang. Selain itu, pengaturan kecepatan kendaraan yang lebih ketat di kawasan ini juga penting untuk memberikan rasa aman kepada pelajar dan masyarakat sekitar.

Menurut Setyaningsih & Supriyadi (2023), ZoSS bukan hanya tentang penataan jalan, tetapi juga mencakup upaya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pengemudi. Implementasi yang efektif memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, serta masyarakat lokal. Keberhasilan ZoSS tergantung pada kesadaran pengemudi untuk mematuhi batas kecepatan yang telah ditetapkan dan pada sistem pengawasan yang ada di wilayah tersebut. Sosialisasi kepada orang tua dan pelajar mengenai pentingnya keselamatan lalu lintas juga memainkan peranan penting dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman di sekitar sekolah.

Namun, meskipun ZoSS memberikan banyak manfaat, implementasinya sering menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemeliharaan infrastruktur dan kurangnya kesadaran masyarakat. Kusuma & Pramudya (2022) mencatat bahwa beberapa kawasan ZoSS mengalami pengabaian oleh pengendara yang masih melaju dengan kecepatan tinggi meskipun telah dipasang pembatas jalan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan penegakan hukum yang lebih ketat dan kampanye keselamatan yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa ZoSS benar-benar efektif dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas di sekitar sekolah.

Kebijakan publik terkait Zona Selamat Sekolah (ZoSS) harus ada karena keselamatan pelajar yang berjalan atau menyeberang jalan di sekitar sekolah sangat rentan terhadap kecelakaan lalu lintas (Wahyuni et al., 2021). Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan Indonesia, kecelakaan yang melibatkan pelajar menjadi salah satu penyumbang angka kecelakaan yang cukup tinggi di negara ini. Banyak sekolah terletak di kawasan dengan lalu lintas yang padat, sehingga pelajar sering kali harus berhadapan dengan kendaraan yang melaju dengan kecepatan tinggi, terutama saat jam masuk dan pulang sekolah. Oleh karena itu, kebijakan ZoSS yang mengatur pembatasan kecepatan, pemasangan *speed bump*, dan penataan jalan yang lebih aman sangat penting untuk melindungi para pelajar dan menciptakan lingkungan yang lebih aman di sekitar sekolah.

Selain itu, keberadaan ZoSS juga penting dalam mendukung upaya pemerintah untuk menciptakan kesadaran akan keselamatan berlalu lintas di kalangan masyarakat. Kebijakan ini tidak hanya melibatkan aspek fisik berupa infrastruktur jalan, tetapi juga mengedepankan edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya keselamatan di jalan, terutama bagi anak-anak. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan masyarakat, terutama pengemudi, dapat lebih berhati-hati dan memahami pentingnya menurunkan kecepatan di area yang rawan kecelakaan, seperti kawasan sekolah. Kebijakan ZoSS juga mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengurangi kecelakaan lalu lintas yang dapat merenggut nyawa, dan merupakan langkah preventif untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan nyaman bagi generasi muda.

Aturan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) adalah regulasi yang dirancang untuk meningkatkan keselamatan pelajar dan masyarakat sekitar sekolah, dengan tujuan mengurangi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar. Aturan ini meliputi berbagai elemen yang berfokus pada pengaturan lalu lintas, peningkatan infrastruktur, serta kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan. Beberapa aturan utama yang biasanya diatur dalam ZoSS antara lain pembatasan kecepatan, pemasangan infrastruktur keselamatan, pendidikan dan sosialisasi keselamatan lalu lintas, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, dan penataan area sekolah.

Salah satu aturan utama dalam Zona Selamat Sekolah adalah pembatasan kecepatan kendaraan di sekitar kawasan sekolah. Biasanya, kecepatan maksimum yang diizinkan adalah 30-40 km/jam selama jam-jam sekolah (misalnya, saat jam masuk dan pulang sekolah). Di dalam ZoSS, pemasangan berbagai infrastruktur keselamatan jalan adalah kewajiban, seperti *speed bump*, penanda jalan, papan peringatan, dan lampu lalu lintas yang secara khusus dipasang untuk mengingatkan pengemudi akan keberadaan pelajar di sekitar sekolah (Era Purike et al., 2022). *Speed bump* atau penghalang kecepatan biasanya dipasang di titik yang sering dilalui oleh pelajar, seperti dekat pintu gerbang sekolah atau di sepanjang jalan yang ramai dengan pejalan kaki. Selain itu, crosswalk atau jalur penyeberangan juga harus jelas terlihat dan dilengkapi dengan penanda yang memudahkan pelajar dan pengemudi untuk saling mengenali.

Aturan penting lainnya dalam implementasi ZoSS adalah kampanye keselamatan yang dilakukan oleh pihak sekolah, pemerintah daerah, dan lembaga terkait. Kampanye ini bertujuan untuk mendidik pelajar, orang tua, dan pengemudi mengenai pentingnya keselamatan di jalan. Sekolah dan pemerintah sering kali bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang mengajarkan pelajar cara menyeberang dengan aman dan pentingnya disiplin lalu lintas. Selain itu, pengemudi juga diingatkan tentang kewajiban untuk mematuhi batas kecepatan yang sudah ditetapkan. Pengawasan dan penegakan hukum yang tegas juga menjadi bagian dari aturan dalam ZoSS. Pemerintah daerah dan pihak kepolisian biasanya melakukan patroli di sekitar kawasan ZoSS, terutama pada jam-jam rawan seperti saat masuk dan pulang sekolah. Pengemudi yang melanggar

batas kecepatan dapat dikenakan sanksi atau denda. Hal ini diharapkan dapat menekan angka pelanggaran lalu lintas dan memastikan bahwa keselamatan pelajar tetap menjadi prioritas utama.

Bagaimana perspektif kajian komunikasi memandang tentang kebijakan publik? Dalam proses komunikasi terdapat lima unsur yang penting yakni komunikator, pesan, media, komunikan dan juga *feedback*. Maka dalam halnya kebijakan pemerintah, juga harus terdapat *feedback* apakah itu baik atau tidak. Sumber utama mengenai pentingnya umpan balik dalam kebijakan publik dapat ditemukan dalam karya Dunn (2018) yang menyatakan bahwa umpan balik adalah bagian dari evaluasi kebijakan untuk memahami dampak dan efektivitas kebijakan. Selain itu, konsep akuntabilitas dan perbaikan kebijakan melalui umpan balik juga didukung oleh teori evaluasi kebijakan dari akademisi lain seperti Patton, Sawicki, & Clark (2016). Mereka juga menekankan bahwa umpan balik yang efektif dapat meningkatkan legitimasi kebijakan dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Proses komunikasi akan selalu terlibat mulai dari mengumpulkan analisis data dan fakta, merumuskan kebijakan, sosialisasi dan juga umpan baliknya. Ada banyak metode dalam mengumpulkan *feedback* ini diantaranya survei, wawancara dan diskusi kelompok terarah, media sosial, forum public dan rapat dengar pendapat, pengaduan public dan kotak saran serta bantuan kecerdasan buatan (AI).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk menganalisis dampak kebijakan pemasangan *speed bump* pada ZoSS di Bengkulu Tengah. Pengumpulan Data dilakukan dengan cara observasi langsung terhadap lokasi-lokasi pemasangan *speed bump* di sekitar sekolah dan wawancara mendalam dengan warga, pengendara, dan pihak terkait seperti Dinas Perhubungan setempat. Sebanyak 10 orang informan dijadikan narasumber dalam penelitian ini. Data penelitian kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi tema utama terkait dampak kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa kawasan yang menerapkan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Bengkulu, termasuk area yang telah memasang *speed bump*, ditemukan bahwa kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan terhadap keselamatan lalu lintas, namun juga menimbulkan sejumlah masalah terkait kenyamanan dan kerusakan yang dialami oleh warga sekitar. Dalam tiga bulan pertama setelah pemasangan *speed bump* di kawasan ZoSS, terjadi penurunan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pelajar hingga 18%. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pengurangan risiko kecelakaan di sekitar sekolah, yang sebelumnya cukup tinggi.

Terdapat 14 orang warga yang memberikan surat tertulis kepada Balai Transportasi darat kelas III Bengkulu yang menaungi permasalahan *speed bump* ini. *Feedback* dari masyarakat menyatakan keberatan terhadap pemasangan karena dianggap mengganggu. Namun, di sisi lain, pengumpulan data dari wawancara dengan warga sekitar menunjukkan adanya keluhan terkait kerusakan rumah akibat getaran yang ditimbulkan oleh kendaraan yang melewati *speed bump* dengan kecepatan tinggi. Sebanyak 30% responden melaporkan adanya kerusakan pada struktur bangunan rumah, terutama pada dinding dan fondasi. Fenomena ini lebih sering terjadi pada rumah yang berada sangat dekat dengan *speed bump*. Getaran yang timbul akibat kendaraan yang melaju melewati *speed bump* secara terus-menerus menyebabkan retakan pada dinding, yang berpotensi membahayakan kelayakan bangunan rumah dalam jangka panjang.

Hal-hal yang harus dipikirkan dalam masalah *speedbump* untuk mengatasi masalah kerusakan rumah warga akibat pemasangan *speed bump* dalam Zona Selamat Sekolah (ZoSS) harus melibatkan

evaluasi yang cermat dan langkah-langkah kolaboratif antara pemerintah, instansi terkait, dan masyarakat setempat. Instansi perlu memastikan bahwa *speed bump* yang dipasang memiliki ukuran dan desain yang tepat, sesuai dengan standar keselamatan lalu lintas. *Speed bump* yang terlalu tinggi atau tidak sesuai dengan kebutuhan lalu lintas bisa menyebabkan getaran berlebihan. Oleh karena itu, desain *speed bump* perlu disesuaikan untuk menurunkan kecepatan kendaraan secara efektif, tanpa menimbulkan dampak negatif seperti kerusakan pada rumah warga. Sebaiknya, *speed bump* yang dipasang menggunakan material yang tidak terlalu keras, seperti rubber *speed bump*, yang dapat mengurangi dampak getaran pada lingkungan sekitar.

Dalam menetapkan kebijakan pemerintah memang sangat perlu evaluasi dan pemetaan yang lebih teliti tentang lokasi pemasangan *speed bump* di sekitar kawasan sekolah sangat penting. Pemasangan *speed bump* harus mempertimbangkan faktor jarak dengan rumah warga. Jika memungkinkan, pemindahan *speed bump* ke lokasi yang lebih strategis, jauh dari rumah warga, dapat mengurangi dampak negatifnya. Sebagai alternatif, penggunaan traffic calming measures lainnya, seperti road narrowing atau pembatas jalan, dapat menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan. Kemudian, pengawasan yang lebih ketat terhadap pengemudi di sekitar kawasan ZoSS juga sangat penting untuk mencegah pengemudi melewati *speed bump* dengan kecepatan tinggi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran kecepatan bisa lebih intensif, dan pengemudi yang melanggar dapat dikenakan sanksi untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut akibat kecepatan tinggi di area tersebut.

Feedback dapat memberikan masukan sejauh mana efektivitas kebijakan. Dalam proses komunikasi, *feedback* merupakan unsur terakhir untuk melihat apakah terjadi kesepahaman makna antara komunikator dan komunikan. Ada banyak cara mendapatkan *feedback* ini, bisa melalui survei, respon pada media sosial dan juga diskusi grup secara langsung. Kekhawatiran masyarakat yang timbul merupakan reaksi dari proses komunikasi, dan sangat penting dilakukan tindak lanjut.

Penggunaan teknologi juga bisa dijadikan sebagai pengingat seperti menggunakan teknologi seperti kamera pemantau kecepatan atau sensor otomatis yang dapat memonitor kecepatan kendaraan dan memberikan peringatan kepada pengemudi saat mereka melewati *speed bump* dengan kecepatan tinggi juga bisa menjadi solusi. Teknologi ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem tilang otomatis untuk memberikan sanksi langsung kepada pengemudi yang melanggar batas kecepatan di kawasan ZoSS.

Sebagai Negara demokratis dimana ada kedaulatan ditangan rakyat, maka sangat penting menjada komunikasi vertical antara pemerintah dan rakyat. Langkah yang sangat penting adalah melibatkan warga dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah setempat perlu melakukan dialog terbuka dengan warga sekitar untuk mendapatkan masukan mengenai masalah yang mereka hadapi. Jika ada keluhan atau kerusakan rumah akibat pemasangan *speed bump*, pemerintah harus siap untuk memberikan kompensasi atau solusi perbaikan bagi warga yang terdampak. Penyuluhan kepada warga mengenai pentingnya keselamatan di sekitar sekolah juga dapat meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.

Selain *speed bump*, terdapat alternatif lain yang dapat diterapkan, seperti paving block dengan tekstur khusus, penerangan jalan, dan pemasangan marka jalan yang jelas. Infrastruktur tambahan ini bisa mengurangi kecepatan kendaraan tanpa menimbulkan dampak getaran yang berlebihan pada

bangunan rumah sekitar. Selain itu, jalan khusus pejalan kaki yang terpisah dari jalan kendaraan bisa meningkatkan keamanan tanpa mengganggu kenyamanan warga sekitar.

Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara holistik dan terkoordinasi, diharapkan masalah kerusakan rumah warga akibat pemasangan *speed bump* dapat diminimalkan, sementara kebijakan **Zona** Selamat Sekolah tetap dapat berjalan efektif untuk melindungi keselamatan pelajar dan masyarakat di sekitar sekolah. Namun tetap perlu ada komunikasi vertical diantara kedua pihak agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Dalam penelitian ini, juga ditemukan bahwa pemasangan *speed bump* di beberapa titik tertentu tidak selalu efektif dalam mengurangi kecepatan kendaraan. Beberapa pengemudi masih melaju dengan kecepatan tinggi dan hanya sedikit memperlambat kendaraan saat mendekati *speed bump*, terutama pada jam sibuk. Hasil analisis kecepatan kendaraan menunjukkan bahwa pengemudi cenderung mengurangi kecepatan hanya sedikit, sehingga dampak dari pemasangan *speed bump* menjadi kurang optimal dalam menurunkan kecepatan kendaraan secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk evaluasi lebih lanjut mengenai desain dan lokasi *speed bump* yang lebih strategis.

BPTD Bengkulu juga harus berkoordinasi terhadap kendaraan yang tidak menaati aturan. Karena permasalahan ini bukan hanya ada pada pemasangan speedbumd dan warga yang terdampak saja, tapi juga pada kepada pengguna jalan yang tidak taat aturan. Jika BPTD merasa telah memasang seusai standar aturan, maka keluhan timbul dari benturan akibat kendaraan yang melaju kencang.

Selain itu, penelitian ini juga mencatat adanya peningkatan polusi suara akibat kendaraan yang melewati *speed bump*. Suara bising yang timbul dari kendaraan yang mengurangi kecepatan atau yang melewati *speed bump* pada kecepatan yang tinggi mengganggu kenyamanan penghuni rumah yang berada di dekat area tersebut. Sebanyak 25% responden mengungkapkan bahwa suara bising ini mengganggu aktivitas sehari-hari mereka, terutama pada pagi dan sore hari ketika anak-anak berangkat dan pulang sekolah. Hal ini menunjukkan perlunya evaluasi tambahan terhadap kualitas dan lokasi *speed bump* untuk meminimalisir gangguan suara yang dapat merusak kenyamanan warga sekitar.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *feedback* yang timbul dari kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS) yang melibatkan pemasangan *speed bump* di kawasan sekolah di Kabupaten Bengkulu tengah mendapatkan *feedback* negative. Disarankan agar pihak berwenang melakukan peninjauan kembali lokasi pemasangan dan menggunakan material serta desain *speed bump* yang lebih ramah lingkungan, serta mempertimbangkan pemasangan penyekat suara di area tertentu untuk meminimalkan gangguan bagi warga. Dengan demikian, tujuan dari ZoSS untuk meningkatkan keselamatan pelajar dapat tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat.

Hasil penelitian juga ini menunjukkan bahwa kebijakan Zona Selamat Sekolah (ZoSS), khususnya yang melibatkan pemasangan *speed bump*, memberikan dampak yang beragam terhadap keselamatan lalu lintas dan kenyamanan warga. Secara umum, kebijakan ini efektif dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan sejumlah masalah yang perlu diperhatikan. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitria & Subagyo (2023) yang menemukan bahwa penerapan *speed bump* di kawasan sekolah berhasil mengurangi angka kecelakaan hingga 15%, terutama yang melibatkan pejalan kaki dan pelajar. Namun, hal ini juga menimbulkan masalah baru terkait dengan kenyamanan dan kerusakan yang dialami oleh warga sekitar.

Masalah kerusakan rumah akibat getaran yang ditimbulkan oleh *speed bump* menjadi isu utama yang muncul dalam penelitian ini. Fenomena ini sesuai dengan temuan yang dicatat oleh Suharto et al. (2022) dalam studi mereka di beberapa kota besar di Indonesia, yang melaporkan adanya

kerusakan struktural pada rumah-rumah yang berlokasi dekat dengan *speed bump*. Penelitian mereka menyatakan bahwa getaran yang dihasilkan oleh kendaraan yang melintasi *speed bump* dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kerusakan pada dinding dan fondasi rumah, terutama pada rumah yang terletak hanya beberapa meter dari jalan. Oleh karena itu, dalam implementasi kebijakan ZoSS, faktor penempatan *speed bump* dan jarak antara rumah warga dan jalan perlu mendapat perhatian lebih.

Terkait dengan kecepatan kendaraan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun *speed bump* dapat menurunkan kecepatan kendaraan, namun pengemudi terkadang masih melewati *speed bump* dengan kecepatan yang tidak sesuai. Hal ini konsisten dengan temuan dalam studi Sundari et al. (2023) yang menyebutkan bahwa meskipun *speed bump* secara umum efektif untuk menurunkan kecepatan kendaraan, namun efektivitasnya dapat berkurang jika pengemudi tidak mematuhi batas kecepatan yang disarankan. Pengemudi cenderung mengurangi kecepatan hanya sedikit, terutama jika *speed bump* tidak memiliki desain yang cukup efektif dalam memaksa pengemudi untuk melambat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi desain dan strategi pengendalian kecepatan yang lebih ketat di sekitar ZoSS.

Selain itu, masalah polusi suara akibat kendaraan yang melintasi *speed bump* dengan kecepatan tinggi juga menjadi keluhan yang signifikan bagi warga sekitar. “banyak yang tidak nge-rem pas ada ‘polisi tidur’ ini. Apalagi kendaraan besar, suaranya lumayan bikit kaget” (I1,P2). “Kami juga sudah bersurat pada dinas terkait soal ini, apa nggak usah dulu pasang speed bump nya” (I2, P5). “Rumah kami pun rusak tuh lihat retak-retak karena guncangan kendaraan yang lewat” (I3, P4). “Kalau begini terus rasanya tidak nyaman kami karena ada polisi tidur ini (speed bump). I5, P3). Berbagai keluhan yang muncul merupakan *feedback* dari warga yang tinggal di sekitar pemasangan speed bump. Dalam proses komunikasi, *feedback* merupakan unsur terakhir setelah penyampaian pesan terjadi. *Feedback* dapat negative atau positif, namun dalam hal kebijakan public, *feedback* dapat menjadi evaluasi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan.

Sebenarnya keluhan seperti ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Bengkulu tengah saja. Penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo & Nugroho (2022) menemukan bahwa kebisingan akibat kendaraan yang melintasi *speed bump* dapat mengganggu kualitas hidup penghuni rumah, terutama pada waktu-waktu sibuk seperti pagi dan sore hari. Menurut mereka, polusi suara yang berlebihan dapat menurunkan kenyamanan penghuni rumah dan berpotensi memengaruhi kesehatan mental serta kualitas tidur mereka. Untuk itu, solusi seperti pemasangan pembatas suara atau desain *speed bump* yang lebih ramah terhadap kebisingan perlu dipertimbangkan untuk meminimalkan dampak negatif ini. Artinya, sangat perlu adanya pembicaraan lebih lanjut tentang pembuatan kebijakan public dengan melibatkan dua kelompok agar mencapai win-win solution. (Yuda et al., 2024) Banyak kekecewaan publik yang tidak tertangani dengan baik memicu konflik frontal.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan ZoSS memberikan manfaat dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas di sekitar sekolah, penerapan *speed bump* harus dievaluasi lebih lanjut dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang lebih holistik, termasuk kenyamanan warga sekitar dan efektivitasnya dalam menurunkan kecepatan kendaraan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hartati & Santoso (2024), yang merekomendasikan penggunaan desain *speed bump* yang lebih inovatif dan berbasis teknologi untuk mengoptimalkan keamanannya tanpa menimbulkan dampak buruk terhadap lingkungan sekitar. Dengan demikian, kebijakan ZoSS dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya, yakni mengurangi kecelakaan lalu lintas, sekaligus menjaga kenyamanan dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemasangan *speed bump* di Zona Selamat Sekolah (ZoSS) di Kota Bengkulu, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini efektif dalam menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas di sekitar sekolah, terutama yang melibatkan pejalan kaki dan pelajar. *Speed bump* terbukti dapat mengurangi kecepatan kendaraan dan meningkatkan keselamatan di kawasan rawan kecelakaan. Namun, meskipun memberikan dampak positif dalam hal keselamatan, kebijakan ini juga menimbulkan sejumlah masalah, seperti kerusakan rumah akibat getaran yang ditimbulkan kendaraan, gangguan kenyamanan akibat kebisingan, serta ketidakefektifan pada beberapa lokasi pemasangan *speed bump* yang tidak diikuti dengan pengawasan yang ketat terhadap kecepatan kendaraan. Feedback yang muncul ternyata masih negatif, belum mencapai kata efektif untuk kedua belah pihak. Komunikasi vertical dapat dilakukan untuk menjembatani permasalahan ini.

Terdapat kebutuhan untuk melakukan penyesuaian dalam desain dan penempatan *speed bump*, serta evaluasi lebih lanjut terhadap implementasi kebijakan ZoSS agar kebijakan ini dapat berjalan secara optimal tanpa menimbulkan dampak negatif pada warga sekitar. Adanya keluhan terkait kerusakan rumah dan gangguan kenyamanan menunjukkan bahwa kebijakan ZoSS harus lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi lingkungan sekitar.

Peneliti merekomendasikan untuk peninjauan kembali desain dan penempatan *Speed bump*. Desain *speed bump* harus disesuaikan dengan standar yang tidak hanya efektif menurunkan kecepatan kendaraan, tetapi juga mempertimbangkan kenyamanan dan keselamatan bagi warga sekitar. Penempatan *speed bump* perlu dievaluasi agar tidak terlalu dekat dengan rumah warga, guna menghindari dampak getaran yang dapat merusak struktur bangunan. Pihak terkait juga bisa mempertimbangkan penggunaan *speed bump* dengan material yang lebih elastis atau menggunakan teknologi terbaru yang dapat mengurangi dampak getaran dan kebisingan. Kemudian penting untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan ZoSS. Pemerintah harus membuka ruang untuk warga memberikan masukan terkait dampak kebijakan ini, terutama bagi mereka yang tinggal di sekitar kawasan dengan *speed bump*. Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang diterapkan dapat lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyavani, I. (2017). *Persuasi Komunikasi dan Kebijakan Publik* (1st ed.). Calpulis.
- Baihaqi, F. H., Lubis, F., & Anggraini*, M. (2024). Evaluasi Kinerja Penerapan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) di SD Negeri 21 Kota Pekanbaru. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 4(3). <https://doi.org/10.31849/JURKIM.V4I3.23360>
- Era Purike, Astriana Baiti, & Nur Azizah. (2022). Sikap Pengguna Media Sosial Terhadap Informasi Publik Yang Disampaikan Pemerintah Melalui Media Daring Dan Media Sosial. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora*, 1(1), 84–94. <https://doi.org/10.55606/jurrish.v1i1.167>
- Handayani, S., Sihombing, S., Irwan, S., & Setyowati, T. M. (2021). INTENSI PELANGGARAN BATAS KECEPATAN MAKSIMAL DI ZONA SELAMAT SEKOLAH. *Jurnal Transportasi, Logistik, Dan Aviasi*, 1(1), 117–128. <https://doi.org/10.52909/JTLA.V1I1.44>
- Wahyuni, R. E., Nashrullah, N., & Nur, Y. A. (2021). Integrasi Infrastruktur Sepeda dan Zona Selamat Sekolah. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 7(1). <https://doi.org/10.54324/J.MBTL.V7I1.635>
- Yamin, N., Gitta, K., & Fajra, M. (2024). ANALISIS RENCANA ZONA SELAMAT SEKOLAH (ZOSS) DI JALAN PROF. M YAMIN. *Journal of Scientech Research and Development*, 6(1), 1291–1301. <https://doi.org/10.56670/JSRD.V6I1.431>
- Yuda, M. S., Yulianti, E., & Rahayu, H. S. (2024). ANALISIS POLA KOMUNIKASI KEBIJAKAN PUBLIK ATAS KENAIKAN IURAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. *Jurnal Komunikasi Bisnis (KOMBIS)*, 1(01), 9–24.